

**SKRIPSI**

**IDENTIFIKASI BENTUK PARTISIPASI DAN HAMBATAN MASYARAKAT DALAM  
PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI JANGKOK SECARA TEKNIS DI  
KECAMATAN CAKRANEGARA**

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi  
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jenjang Strata I  
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram



**DISUSUN OLEH :**

**SONI ADI BIMANTORO**

**418130047**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**



**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI  
SKRIPSI**

**IDENTIFIKASI BENTUK PARTISIPASI DAN HAMBATAN MASYARAKAT  
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI JANGKOK SECARA  
TEKNIS DI KECAMATAN CAKRANEGARA**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA: SONI ADI BIMANTORO  
NIM: 418130047

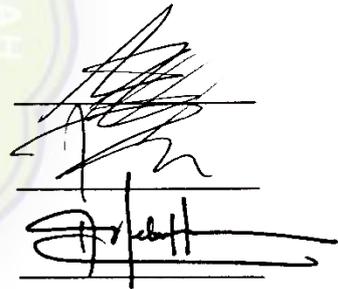
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada hari Rabu, 3 Agustus 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

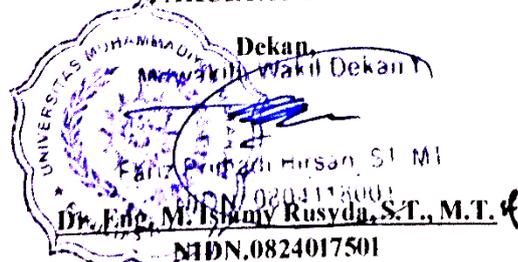
**Susunan Tim Penguji**

1. Penguji I : Ardi Yuniarman, S.T., M.Sc
2. Penguji II : Rasyid Ridha, S.T., M.Si
3. Penguji III : Febrita Susanti, S.T., M.Eng



Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS TEKNIK**

**Dekan,**  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Eng. M. Isham Rusyda, S.T., M.T.  
NIDN.0824017501

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SONI ADI BIMANTORO  
NIM : 418130047  
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Judul Skripsi : Identifikasi Bentuk Partisipasi Dan Hambatan Masyarakat  
Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Jangkok Secara  
Teknis Di Kecamatan Cakranegara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Identifikasi Bentuk Partisipasi Dan Hambatan Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Jangkok Secara Teknis Di Kecamatan Cakranegara adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan arahan dari dosen pemimbing dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain. Sumber informasi yang digunakan baik dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah dicantumkan dalam daftar pustaka pada skripsi ini.

Apabila pada kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Mataram, 3 Agustus 2022



**Soni Adi Bimantoro**  
418130047



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT  
Jl. K.H.A. Dahlan No 1 Telp. (0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [ps-upt@lib.ummat.ac.id](mailto:ps-upt@lib.ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soni Adi Bimandoro  
NIM : 910130097  
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 7 Januari 2000  
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas : Teknik  
No. Hp : 087753063690  
Email : fiah.kardon@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Identifikasi Bentuk Partisipasi dan Hambatan Masyarakat Dalam Pengelolaan  
Pencemaran Sungai Jangkot Secara Teknis di Kecamatan Cakranegara

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.* 394

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Agustus .....2022  
Penulis



Soni Adi Bimandoro  
NIM. 910130097

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp. (0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soni Adi Bimantoro  
NIM : 118130019  
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 7 Januari 2000  
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas : Teknik  
No. Hp/Email : 087753863600 / fion.fardon@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Identifikasi Bentuk dan Hambatan Masyarakat Dalam Pengendalian  
Pencemaran Sungai Jangkat secara Teknis di Kecamatan Cakranegara

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Agustus ..... 2022  
Penulis



Soni Adi Bimantoro  
NIM. 118130019

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTTO HIDUP**

“Santai saja, nanti selesai sendiri.”



## KATA PENGANTAR

*Assalamalaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul Identifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Jangkok Secara Teknis di Kecamatan Cakranegara dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan pemenuhan tugas akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini kedepannya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mataram, 3 Agustus 2022

Penyusun

## ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam pengendalian pencemaran yang terjadi di Sungai Jangkok, karena dalam hal ini masyarakat merupakan subjek dari pembangunan. Tujuan dari pengendalian pencemaran ini tidak lain adalah demi kesejahteraan kehidupan masyarakat, dimana masyarakat dalam hal ini adalah objek dari pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada pasal 70. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi serta hambatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok secara teknis di Kecamatan Cakranegara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah berupa partisipasi secara pikiran, ide, atau gagasan dan secara tenaga. Bentuk partisipasi secara pikiran, ide, atau gagasan adalah berupa usulan untuk kegiatan bersih-bersih sungai dan pengadaan sarana persampahan. Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi adalah ketergantungan dengan pemerintah, minimnya wawasan, serta minimnya sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat tergolong dalam pengendalian secara teknis dalam bentuk restorasi hidrologi sungai. Segala bentuk upaya masyarakat merupakan upaya untuk memulihkan kondisi Sungai Jangkok yang tercemar, terbatas hanya secara kualitas dan pada sumber pencemar limbah padat.

**Kata Kunci: Bentuk Partisipasi, Sungai Jangkok, Pengendalian Pencemaran.**

## ABSTRACT

Because the community is the focus of development in this situation, community involvement is crucial to reducing pollution in the Jangkok River. The community in this situation is the target of development, and the only reason to limit this pollution is for the welfare of people's lives. Article 70 of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) regulates community involvement in pollution prevention. This study intends to pinpoint community engagement strategies and obstacles to Cakranegara District's technical management of Jangkok River pollution. The research method used is descriptive qualitative using interactive analysis techniques. According to the study's findings, community participation takes the form of giving one's thoughts, ideas, or concepts as well as one's energy. Participation in thoughts, ideas, or ideas takes the form of suggestions for cleaning up rivers and buying disposal facilities. Dependence on the government, a lack of knowledge, and a lack of socialization are barriers to community participation. Technical control in the form of river hydrology restoration incorporates community participation. All community initiatives are attempts to clean up the Jangkok River, with the sources of quality and solid waste pollution being the only restrictions.

**Keywords:** *Form of Participation, Jangkok River, Pollution Control*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	v
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Manfaat .....	6
1.5 Ruang Lingkup Materi .....	6
1.6 Ruang Lingkup Wilayah .....	6
1.7 Kerangka Berpikir .....	7
1.8 Sistematika Penulisan .....	10

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Terminologi Judul.....	11
2.2 Tinjauan Teori.....	12
2.2.1 Partisipasi Masyarakat .....	12
2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	15
2.2.3 Hambatan-Hambatan Masyarakat Dalam Berpartisipasi .....	16
2.2.4 Sungai.....	17
2.2.5 Pencemaran Air Sungai.....	18
2.2.6 Sumber Pencemaran Air Sungai .....	19
2.2.7 Pengendalian Pencemaran Sungai.....	20
2.3 Tinjauan Kebijakan .....	23
2.3.1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	23
2.3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.....	25
2.3.3 Peraturan Daerah Kota Mataram No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	27
2.3.4 Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.....	28
2.4 Penelitian Terdahulu .....	31

## **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan aktu Penelitian .....	35
3.2 Jenis Penelitian.....	35

3.3 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4 Variabel Penelitian .....	37
3.5 Populasi dan Sampel .....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	42
3.7 Kerangka Penelitian .....	43
3.8 Desain Survey .....	44

#### **BAB IV. PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum.....	46
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1.1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian Makro.....	46
4.1.1.2 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian Meso .....	47
4.1.1.3 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian Mikro .....	47
4.1.2 Kualitas Air Sungai Jangkok.....	48
4.1.3 Bentuk Aktifitas Masyarakat di Wilayah Aliran Sungai .....	49
4.2 Analisis Bentuk dan Hambatan Masyarakat dalam Berpartisipasi Serta Bentuk Pengendalian Pencemaran Air Sungai Jangkok Secara Teknis.....	52
4.2.1 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat .....	52
4.2.1.1 Partisipasi Secara Pikiran, Ide, atau Gagasan .....	54
4.2.1.2 Partisipasi Secara Tenaga.....	56
4.2.1.3 Partisipasi Secara Pikiran dan Juga Tenaga .....	58
4.2.1.4 Partisipasi Secara Keahlian .....	59
4.2.1.5 Partisipasi Secara Barang.....	60
4.2.1.6 Partisipasi Secara Uang.....	60

4.2.2 Analisis Hambatan Masyarakat Dalam Berpartisipasi.....	60
4.2.2.1 Ketergantungan Dengan Pemerintah.....	61
4.2.2.2 Minimnya Wawasan .....	62
4.2.2.3 Ketersediaan Waktu.....	63
4.2.2.4 Minimnya Sosialisasi dari Pihak Pemerintah atau Swasta	64
4.2.3 Analisis Bentuk Pengendalian Pencemaran Teknis .....	66
4.2.3.1 Restorasi Hidrologi.....	66
4.2.3.2 Restorasi Ekologi.....	67
4.2.3.3 Restorasi Morfologi.....	67
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	73



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Karakteristik Responden Dirinci Berdasarkan Pendidikan .....	39
Tabel 3.3 Karakteristik Responden Dirinci Berdasarkan Pekerjaan.....	40
Tabel 3.4 Desain Survey .....	44
Tabel 4.1 Luas Wilayah Penelitian .....	47
Tabel 4.2 Hasil Uji Kualitas Air Sungai Jangkok di Kecamatan Cakranegara	49
Tabel 4.3 Daftar Pekerjaan Responden yang Berpartisipasi Secara Pikiran, Ide, atau Gagasan, Secara Tenaga, dan Secara Keduanya.....	59
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ...	62
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ...	63



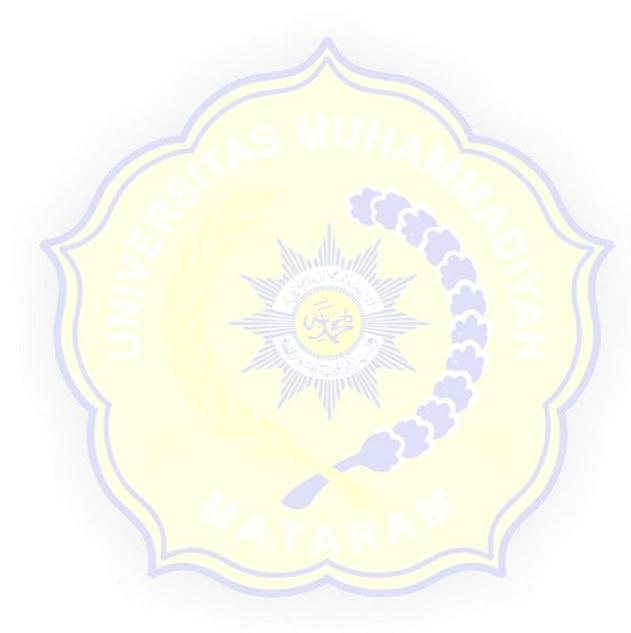
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bentuk Tanggul Sungai Jangkok di Kecamatan Cakranegara ....	49
Gambar 4.2 Jaringan Drainase yang Mengalir ke Sungai Jangkok .....	51
Gambar 4.3 Kondisi Bantaran Sungai Jangkok di Lingkungan Rungkang Jangkok	51
Gambar 4.4 Pipa Pembuangan Limbah ke Sungai (Kiri) dan Jamban di Pinggir Sungai (Kanan) .....	52
Gambar 4.5 Diagram Venn Partisipasi Masyarakat Secara Pikiran dan Tenaga	53
Gambar 4.6 Diagram Venn Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi Secara Pikiran, Ide atau Gagasan.....	54
Gambar 4.7 Kegiatan Masyarakat Membakar Tumpukan Sampah di Pinggir Sungai Jangkok.....	57



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir .....	9
Bagan 3.1 Kerangka Penelitian .....	43



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Partisipasi masyarakat merupakan bekal penting dalam mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kesuksesan dalam pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata bertolok ukur pada kinerja dan kemampuan pihak pemerintah, namun juga berpatokan pada kapabilitas dan keinginan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan program tersebut (Jumarni, 2020). Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan seluruh bagian masyarakat bersama dengan pemerintah untuk menyukseskan program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat secara umum (Soemarto, 2013). Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah dalam upaya melaksanakan program pembangunan akan mampu mengimbangi keterbatasan anggaran. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan (Jumarni, 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (UU Propenas) termuat beberapa bidang pembangunan yang menjadi sasaran utama dalam proses pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dewasa ini dapat dilihat bahwa pembangunan semakin erat hubungannya dengan kelestarian lingkungan hidup. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang memiliki manfaat adalah pembangunan yang dalam tahapannya melibatkan

unsur kelestarian lingkungan, dan jika pembangunan mengabaikan unsur tersebut maka resiko pembangunan yang muncul adalah dampak negatif dari pembangunan (Rosana, 2018). Hal ini selaras dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pada bulan Juni 1992 yang diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro, dimana hasil KTT tersebut menekankan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam demi masa yang akan datang. Jauh sebelum itu pada tahun 1972 Prof. Dr. Emil Salim selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada kala itu menghadiri sebuah konferensi yang diadakan PBB di Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia sebagai ketua delegasi Republik Indonesia, dimana konferensi tersebut menjadi awal mula munculnya kebijakan terkait lingkungan hidup di Indonesia (Azis, Lydia, Arianto, & Resosudarmo, 2010).

Kebijakan yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Secara umum UUPPLH mengatur upaya pelestarian lingkungan serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara terstruktur. Selain itu, pada pasal 65 ayat (4) dan pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat juga berhak dan berkesempatan untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada ayat ini, jelas disebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan secara tidak langsung memiliki pengaruh penting dalam mencapai

sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada UU Proenas.

Kota Mataram memiliki beberapa aliran sungai, salah satunya adalah Sungai Jangkok yang berhulu dari Gunung Buanmangge dan bermuara ke barat di Selat Lombok. Sungai Jangkok merupakan salah satu sungai yang tercemar dengan indikasi secara fisik yaitu air bersifat asam, berbau dan tidak dapat dijadikan air baku. Hasil uji biologis menunjukkan bahwa terdapat aktivitas biologis dan kimiawi mikroorganisme pada Sungai Jangkok. Sedangkan hasil uji kimiawi menunjukkan bahwa air sungai ini bersifat asam serta terdapat lapisan minyak pada permukaan air. Pencemaran yang terjadi disebabkan oleh ketidaksadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, seperti membuang limbah rumah tangga, industri, dan pertanian langsung ke sungai (Idrus, 2015). Selain itu, Kecamatan Cakranegara yang merupakan daerah hulu aliran Sungai Jangkok di Kota Mataram termasuk dalam kategori sungai tercemar berdasarkan hasil uji bakteri coliform dengan nilai 92.000 MPN/100 mL. Dengan teridentifikasinya kandungan bakteri coliform di aliran sungai ini menunjukkan bahwa aliran Sungai Jangkok di Kecamatan Cakranegara telah terkontaminasi patogen yang disebabkan oleh masih banyaknya warga sekitar yang buang air besar di sungai. Dari hasil pengujian tersebut, penyebab utama pencemaran Sungai Jangkok di Kecamatan Cakranegara adalah minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pencemaran Sungai Jangkok, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah,

limbah rumah tangga, hingga melakukan kegiatan mandi dan buang air di sekitar Sungai Jangkok (Ruliantara, 2018).

Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pengujian terhadap kualitas mutu air pada Sungai Jangkok. Dari hasil penelitian, didapati bahwa Sungai Jangkok termasuk sungai yang tercemar dengan kandungan bakteri *Eschericia Coli* (E-Coli) yang tinggi. Masyarakat yang memiliki bangunan di sekitar daerah aliran Sungai Jangkok masih memiliki kebiasaan membuang sampah hingga buang air besar di sungai, selain itu terdapat pipa-pipa pembuangan limbah rumah tangga yang tidak diolah dan langsung di salurkan ke badan sungai. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya penanggulangan pencemaran sungai dengan menjalankan program restorasi Sungai Jangkok serta pembersihan sungai, drainase, dan saluran irigasi. Namun upaya tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pencemaran yang terjadi dikarenakan program tersebut tidak dilaksanakan secara jangka panjang. Terhentinya program tersebut merupakan akibat dari tingginya pengeluaran dana untuk membayar ratusan pekerja setiap harinya. Pengeluaran dana dapat ditekan jika pemerintah melibatkan masyarakat secara sukarela untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Namun di sisi lain, masyarakat juga belum terlalu peka dan minim inisiatif untuk ikut berpartisipasi (Masnun, 2013).

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam pengendalian pencemaran yang terjadi di Sungai Jangkok, karena dalam hal ini masyarakat merupakan subjek dari pembangunan. Tujuan dari pengendalian pencemaran ini tidak lain adalah demi kesejahteraan kehidupan masyarakat, dimana masyarakat dalam hal ini adalah objek dari pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi serta hambatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok secara teknis di Kecamatan Cakranegara.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi serta hambatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok secara teknis di Kecamatan Cakranegara.

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi dan hambatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok secara teknis di Kecamatan Cakranegara.

## **1.4 Manfaat**

### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Untuk memberikan sumbangsih pengembangan wawasan keilmuan khususnya mengenai partisipasi dan hambatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok.

### **b. Manfaat Secara Praktis**

- 1) Sebagai media sosialisasi kepada pembaca terkait partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok.
- 2) Sebagai masukan bagi pemerintah dan masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok.

## **1.5 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada aspek lingkungan dan sosial terkait partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran sungai secara teknis. Pada aspek lingkungan akan dibahas mengenai aktivitas masyarakat di sekitar Sungai Jangkok dan kondisi terkini terkait pencemaran yang terjadi di Sungai Jangkok. Dalam aspek sosial, akan dilakukan identifikasi terkait bentuk partisipasi dan hambatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok secara teknis.

## **1.6 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup kegiatan ini adalah kelurahan-kelurahan di Kecamatan Cakranegara yang dialiri oleh Sungai Jangkok yaitu Kelurahan Sayang-Sayang, Karang Taliwang, dan Cakranegara Utara. Secara umum, daerah aliran sungai

(DAS) Jangkok terletak pada  $-08^{\circ}24'28''$  hingga  $-8^{\circ}35'14''$  lintang selatan dan  $122^{\circ}04'16''$  sampai  $122^{\circ}23'40''$  bujur timur. Sungai Jangkok memiliki luas  $170,29 \text{ km}^2$  dan panjang aliran utama  $58,868 \text{ km}$  yang mengalir dari Gunung Buanmangge hingga Selat Lombok.

Sungai Jangkok yang mengalir di Kecamatan Cakranegara dipilih dalam penelitian ini karena aliran sungai di kecamatan ini termasuk dalam sungai tercemar secara biologi berdasarkan hasil uji dengan parameter tingkat bakteri coliform yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pencemaran yang terjadi di Sungai Jangkok. Masyarakat di sekitar Sungai Jangkok di Kecamatan Cakranegara masih melakukan kegiatan membuang sampah ke sungai, mandi, serta buang air besar dan kecil (Ruliantara, 2018).

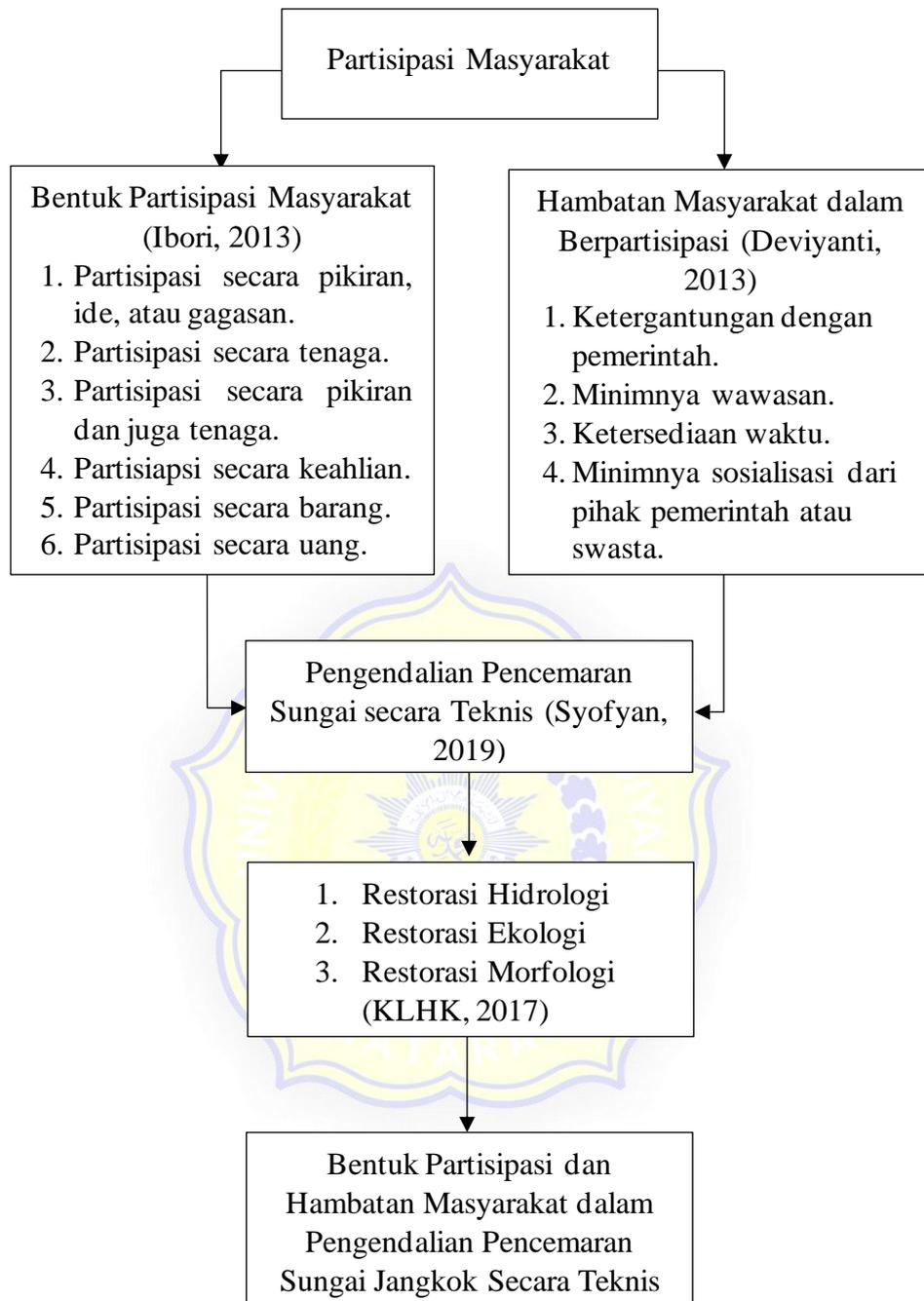
### **1.7 Kerangka Berpikir**

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah hal yang penting dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat bersama dengan pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembangunan.

Pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup merupakan salah satu bidang pembangunan utama yang tertera dalam UU Propenas. Pembangunan SDA dan lingkungan hidup juga diangkat menjadi topik utama dalam beberapa konferensi internasional. Hasil konferensi-konferensi tersebut

selanjutnya menjadi awal mula munculnya kebijakan terkait lingkungan hidup di Indonesia.

Upaya pengendalian pencemaran sebagaimana yang telah dijelaskan pada UUPPLH merupakan sebuah tindakan yang sistematis dengan tujuan untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi: a) partisipasi secara pikiran, ide, atau gagasan; b) partisipasi secara tenaga; c) partisipasi secara pikiran dan juga tenaga; d) partisipasi secara keahlian; e) partisipasi secara barang; dan f) partisipasi secara uang (Ibori, 2013). Lalu hambatan yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi antara lain; a) ketergantungan dengan pemerintah; b) minimnya wawasan; c) ketersediaan waktu; dan d) minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau swasta (Deviyanti, 2013). Bentuk pengendalian pencemaran sungai dapat berupa pengendalian secara teknis dan pengendalian secara non teknis (Syofyan, 2019).



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir  
*Sumber: Kajian Peneliti, 2022*

## 1.8 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup wilayah, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

### 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas tentang terminologi judul penelitian, tinjauan teori, tinjauan kebijakan, dan penelitian terdahulu.

### 3. Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, kerangka penelitian, dan desain survei.

### 4. Bab IV Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat, serta bentuk pengendalian pencemaran sungai secara teknis pada Sungai Jangkok di Kecamatan Cakranegara.

### 5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Terminologi Judul

Terminologi judul merupakan pembahasan yang dilakukan untuk menjelaskan makna dari judul penelitian agar pembaca dapat memahami tujuan dari penelitian tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, penjelasan dari judul penelitian ini adalah (KBBI, 2016):

- a. Identifikasi : Kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan dan meneliti.
- b. Bentuk : Wujud
- c. Partisipasi : Keikutsertaan
- d. Dan : Kata penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara
- e. Hambatan : Halangan
- f. Masyarakat : Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- g. Dalam : Kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi (kiasan).
- h. Pengendalian : Proses, cara, perbuatan mengendalikan.
- i. Pencemaran : Pengotoran.
- j. Sungai : Aliran air yang besar (biasanya buatan alam).
- k. Jangkok : Nama sebuah sungai di Pulau Lombok.
- l. Secara : Menurut
- m. Teknis : Secara teknik
- n. Di : Kata depan untuk menandai tempat

- o. Kecamatan : Daerah bagian dari kabupaten/kota yang membawahkan beberapa desa/kelurahan.
- p. Cakranegara : Sebuah nama kecamatan di Kota Mataram.

Berdasarkan pengertian di atas, makna dari “Identifikasi Bentuk Partisipasi dan Hambatan Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Jangkok Secara Teknis di Kecamatan Cakranegara” adalah kegiatan meneliti wujud dari keikutsertaan dan halangan masyarakat dalam mengendalikan pencemaran secara teknis pada Sungai Jangkok yang berada di Kecamatan Cakranegara.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari bahasa inggris *participate* yang memiliki arti ikut serta. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan sekelompok seseorang atau anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Theresia, 2014). Partisipasi juga diartikan sebagai suatu tahapan aktif dan inisiatif yang diambil dan dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan tahapan melalui lembaga dan mekanisme dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif (Nasdian, 2014).

Partisipasi juga dibagi menjadi enam definisi yaitu (Mikkelsen, 1999):

- a. Partisipasi merupakan ikut andil tanpa paksaan dalam suatu kegiatan namun tidak ikut dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keinginan untuk menerima dan menanggapi sebuah kegiatan-kegiatan pembangunan.

- c. Partisipasi merupakan suatu proses aktif, dimana masyarakat memiliki inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk ikut serta dalam suatu kegiatan.
- d. Partisipasi merupakan pemanfaatan dialog antara masyarakat dengan *stakeholder* yang melakukan persiapan, pelaksanaan, dan *monitoring*, untuk memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan diri, lingkungan, dan kehidupan mereka.

Selanjutnya, masyarakat diartikan sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Linton, 1984). Masyarakat juga diartikan sebagai hubungan manusia atau sekelompok manusia yang hidup secara berkelompok maupun individu yang berhubungan satu sama lain serta saling berpengaruh dan menciptakan perubahan sosial (Mayangsari, 2017).

Masyarakat muncul dari adanya sekelompok individu yang telah bekerja sama serta tinggal cukup lama. Dalam kurun waktu tersebut, sekumpulan

individu yang belum terorganisasikan tersebut mengalami sebuah proses, yaitu (Saebani, 2012):

- a. Penyesuaian dan membentuk kelompok perilaku dari anggotanya.
- b. Timbul perasaan kelompok.

Selain itu, partisipasi juga didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang di dalam kelompok sosial, di luar dari pekerjaannya sendiri untuk turut berkontribusi dari kegiatan masyarakatnya. Keterlibatan tersebut dilakukan sebagai dampak dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya (Mardikanto & Soebianto, 2012).

Partisipasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang membutuhkan usaha dan waktu untuk bekerja sama, dan akan berhasil jika didasari oleh kepercayaan. Dengan kata lain partisipasi dibatasi sebagai sebuah fenomena kerakyatan dimana dalam sebuah perencanaan kegiatan, masyarakat turut dilibatkan dan ikut serta memikul tanggung jawab (Darmada, 2011).

Selanjutnya, partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013).

Partisipasi masyarakat juga dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat pada sebuah pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud adalah ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan dapat memaksimalkan keinginan untuk menerima dan menimpali, baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari buah pikiran, penginterpretasian kebijaksanaan sampai dengan pengimplementasian program (Darmada, 2011).

Berdasarkan pengertian tentang partisipasi dan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sebuah keikutsertaan setiap masyarakat atau sekelompok masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan sebuah kegiatan atau kebijakan. Keikutsertaan masyarakat tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian.

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk, partisipasi masyarakat dibedakan menjadi (Dwiningrum S. I., 2015):

- a. Partisipasi secara fisik, merupakan partisipasi yang dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan maupun usaha-usaha. Usaha yang dimaksud dapat berupa usaha bersekolah, memberikan beasiswa, dan dapat berupa membantu pihak pemerintah dengan membangun gedung untuk umum, dan sejenisnya.
- b. Partisipasi secara nonfisik, merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam memastikan tujuannya. Hal yang dimaksud adalah

seperti membantu dalam menempuh pendidikan dan meratakan wawasan masyarakat untuk meningkatkan keinginan menuntut ilmu.

Selain itu, terdapat pendapat berbeda tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain (Ibori, 2013):

- a. Partisipasi secara pikiran, ide, atau gagasan.
- b. Partisipasi secara tenaga.
- c. Partisipasi secara pikiran dan juga tenaga.
- d. Partisipasi secara keahlian.
- e. Partisipasi secara barang.
- f. Partisipasi secara uang.

Menurut pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi dibagi dalam beberapa bentuk yaitu partisipasi secara pikiran, partisipasi secara tenaga, partisipasi secara pikiran dan tenaga, partisipasi secara keahlian, partisipasi secara barang, dan partisipasi secara uang. Selain itu, partisipasi juga dibedakan menjadi partisipasi secara fisik dan partisipasi secara nonfisik.

### **2.2.3 Hambatan-Hambatan Masyarakat Dalam Berpartisipasi**

Dalam sebuah partisipasi masyarakat, tentu saja terdapat faktor-faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi masyarakat dalam turut serta pada sebuah pembangunan. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain (Deviyanti, 2013):

- a. Ketergantungan dengan pemerintah.

Masyarakat lebih sering membebankan setiap proses pembangunan kepada pemerintah, dimana seharusnya kegiatan yang masih bisa dilaksanakan sendiri secara swadaya oleh masyarakat dan bisa dilakukan sendiri tanpa menunggu tindakan dari pemerintah.

b. Minimnya wawasan.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada sebuah pembangunan. Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam sebuah pembangunan.

c. Ketersediaan waktu.

Ketersediaan waktu masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam keterlibatan masyarakat pada sebuah pembangunan, dimana masyarakat sendiri memiliki kesibukan masing-masing.

d. Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau swasta.

Minimnya sosialisasi lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta saat akan melaksanakan kegiatan pembangunan menyebabkan masyarakat tidak melibatkan diri dalam tahapan pembangunan tersebut.

#### **2.2.4 Sungai**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai, menjelaskan bahwa sungai merupakan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi

oleh garis sempadan. Sungai juga dapat diartikan sebagai aliran terbuka dengan ukuran geometrik berubah-ubah tergantung pada debit aliran, material dasar dan tebing, serta jumlah dan jenis endapan yang terbawa air. Sungai selalu menyesuaikan dengan perubahan keadaan di sekitarnya. Penyesuaian yang dimaksud adalah pengikisan, erosi, pengendapan, dan pengangkutan. Pada suatu keadaan, tidak selalu terjadi proses erosi maupun deposisi pada sungai. Keadaan tersebut merupakan kondisi keseimbangan sungai (Putra, 2014).

Dari hulu sungai yang berada di pegunungan, aliran badan sungai semakin membesar hingga ke bagian hilir akibat dari paduan aliran sungai-sungai lain. Apabila sungai semacam ini memiliki cabang lebih dari dua, maka cabang yang memiliki aliran lebih panjang dan volume lebih besar merupakan sungai utama. Aliran sungai pada umumnya berakhir di danau atau laut (Putra, 2014).

#### **2.2.5 Pencemaran Air Sungai**

Pencemaran air sungai merupakan keadaan dimana masuknya buangan ke dalam badan sungai dan berdampak pada berubahnya kondisi perairan secara fisika, kimia, maupun biologi (Astari, 2016). Dalam pengertian lain, pencemaran sungai merupakan keadaan dimana masuknya makhluk hidup, energi, zat, atau komponen lainnya ke dalam badan sungai sehingga terjadi penurunan kualitas air hingga ke tingkat tertentu dan berakibat pada hilangnya fungsi air sebagaimana peruntukannya (Tarigan, 2013).

Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP-02/MENKLH/1/1988 tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan, air berdasarkan peruntukannya digolongkan menjadi:

- a. Golongan A, merupakan air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu.
- b. Golongan B, merupakan air yang dapat digunakan sebagai sumber air yang diolah untuk menjadi air minum dan kebutuhan rumah tangga.
- c. Golongan C, merupakan air yang dapat digunakan sebagai sumber keperluan peternakan dan perikanan.
- d. Golongan D, merupakan air yang dapat digunakan sebagai sumber kebutuhan pertanian, usaha perkotaan, industri, dan milik negara.

Pencemaran sungai dapat terjadi jika pengaruh kualitas limbah pencemaran melebihi kualitas baku mutu air limbah, selain itu dapat juga disebabkan oleh debit air limbah yang dihasilkan. Pada musim hujan debit air sungai akan menjadi lebih banyak sehingga konsentrasi kandungan pencemar akan dinetralkan karena terjadi proses pengenceran. Begitu pula sebaliknya, pada musim kemarau dimana debit air sungai lebih sedikit maka konsentrasi pencemar akan lebih pekat (Batubara, 2011).

#### **2.2.6 Sumber Pencemaran Air Sungai**

Sumber-sumber pencemaran sungai dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (Soedomo, 2011):

- a. Sumber pencemaran sungai menetap, yaitu limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, dan sebagainya. Sumber pencemaran ini terjadi pada satu titik pencemaran.
- b. Sumber pencemaran sungai tidak menetap, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah domestik, dan sebagainya yang dimana titik pencemaran terjadi di beberapa titik atau menyebar dan dengan jarak yang tidak konstan.
- c. Sumber pencemar sungai campuran, merupakan sumber pencemaran yang berasal dari titik pencemaran tetap dan tidak tetap.

Dalam dokumen Kajian Beban Pencemar DAS Cipager oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, sumber pencemaran sungai dapat dibedakan menjadi sumber pencemaran domestik dan sumber pencemaran nondomestik. Yang termasuk sumber pencemaran domestik adalah pencemaran yang bersumber dari perkampungan, kota, pasar, perhotelan, jalan, rumah sakit, dan terminal. Sedangkan yang termasuk sumber pencemaran nondomestik adalah pabrik, pertanian, industri, peternakan, transportasi, dan perikanan.

### **2.2.7 Pengendalian Pencemaran Sungai**

Berdasarkan UUPPLH, pengendalian pencemaran diartikan sebagai sebuah tindakan yang sistematis dengan tujuan untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran sungai adalah segala

tindakan yang tertata dan teratur dalam rangka menjaga fungsi lingkungan sungai.

Pengendalian pencemaran sungai pada prinsipnya dibedakan menjadi dua yaitu pengendalian secara teknis, dan secara non-teknis. Pengendalian secara non-teknis merupakan suatu pengendalian pencemaran sungai dengan menciptakan sebuah peraturan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan yang berdampak pada kelestarian sungai sehingga tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pengendalian secara teknis yaitu perlakuan masyarakat ataupun industri terhadap perlakuan buangnya seperti mengubah proses pembuangan, mengelola limbah sebelum dibuang, melakukan kegiatan gotong royong, dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya (Syofyan, 2019).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, terdapat beberapa tindakan pengendalian pencemaran yang tergolong dalam pengendalian secara teknis, yaitu (KLHK, 2017):

a. Restorasi Hidrologi

Restorasi hidrologi merupakan sebuah tindakan untuk memulihkan kembali kualitas maupun kuantitas air sungai. Restorasi pemulihan kualitas air dapat dilakukan dengan meminimalisir sumber pencemar limbah cair dan limbah padat. Sedangkan restorasi kuantitas air dapat dilakukan dengan merekonstruksi tinggi muka air dan kecepatan aliran menyerupai wujud alamiahnya.

b. Restorasi Ekologi

Restorasi ekologi merupakan sebuah tindakan untuk meningkatkan dan memelihara kualitas air sungai dengan melakukan penanaman kembali pada zona akuatik, zona riparian, dan zona *upland*. Restorasi zona akuatik dilakukan dengan menanam tanaman yang sesuai dengan karakter tanaman akuatik. Lalu restorasi zona riparian dilakukan dengan menanam kembali rumput-rumputan di daerah bantaran sungai. Sedangkan restorasi zona *upland* dilakukan dengan menanam tanaman dengan akar tunjang dan batang keras di daerah *upland*.

c. Restorasi Morfologi

Restorasi morfologi merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan bentang memanjang dan melintang sungai sejauh mungkin menyerupai morfologi sungai alamiahnya. Restorasi morfologi dapat dilakukan dengan mengembalikan komponen material yang ada di sepanjang alur dan tebing sungai berdasarkan material alamiahnya. Alur sungai yang telah direstorasi harus dapat menjadi habitat bagi ekosistem sungai yang bersangkutan. Dimensi alur memanjang sungai harus didesain berdasarkan hitungan hidraulika dan kapasitasnya harus mampu mengalirkan air banjir sesuai dengan peraturan yang ada.

## **2.3 Tinjauan Kebijakan**

### **2.3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **2.3.1.1 Tujuan**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

#### **2.3.1.2 Hak, Kewajiban, dan Larangan**

Dalam kebijakan ini dijelaskan mengenai hak setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

### **2.3.1.3 Peran Masyarakat**

Dalam kebijakan ini dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau.
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **2.3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai**

#### **2.3.2.1 Penguasaan Sungai**

Sungai dikuasai oleh negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai tersebut dilakukan oleh menteri. Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai menteri menetapkan:

- a. Garis sempadan sungai.
- b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai.
- c. Pengaturan bekas sungai.

### **2.3.2.2 Fungsi Sungai**

Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

### **2.3.2.3 Kewajiban dan Larangan**

Kewajiban dan larangan terhadap sungai berupa:

1. Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan sungai.
2. Masyarakat dilarang mengubah aliran sungai kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.
3. Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.
4. Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.
5. Mengambil dan menggunakan air sungai selain untuk keperluan pokok sehari-hari hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

6. Melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai hanya dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

### **2.3.3 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**

#### **2.3.3.1 Tujuan**

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat, dan kualitas lingkungan.
- b. Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik.

#### **2.3.3.2 Hak Masyarakat**

Dalam pengelolaan air limbah domestik, masyarakat memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik.
- b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah atau pihak lain yang bertanggung jawab.
- c. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan.
- d. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

#### **2.3.3.3 Kewajiban Masyarakat**

Dalam pengelolaan air limbah domestik, masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. Mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem pengelolaan air limbah domestik skala individual atau permukiman sesuai standar teknis yang berlaku.
- b. Membuat tangki septik skala individual.
- c. Meletakkan tangki septik di tempat yang mudah dijangkau oleh sistem pengangkutan.

#### **2.3.3.4 Peran Serta Masyarakat**

Dalam pengelolaan air limbah domestik, masyarakat dapat berperan serta dalam:

- a. Melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- b. Memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi.
- c. Memberi usul, saran, dan pertimbangan kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- d. Mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.

#### **2.3.4 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah**

##### **2.3.4.1 Tujuan**

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.
- b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan.
- d. Menjadikan sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.
- e. Mewujudkan kinerja pelayanan kebersihan yang profesional, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

#### **2.3.4.2 Hak Masyarakat**

Dalam pengelolaan sampah, masyarakat berhak untuk:

- a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat.
- b. Mendapatkan pelayanan kebersihan yang baik dan berwawasan lingkungan oleh pemerintah atau pihak lain yang bertanggung jawab.
- c. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah.
- d. Memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

#### **2.3.4.3 Kewajiban Masyarakat**

Dalam pengelolaan sampah, setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk:

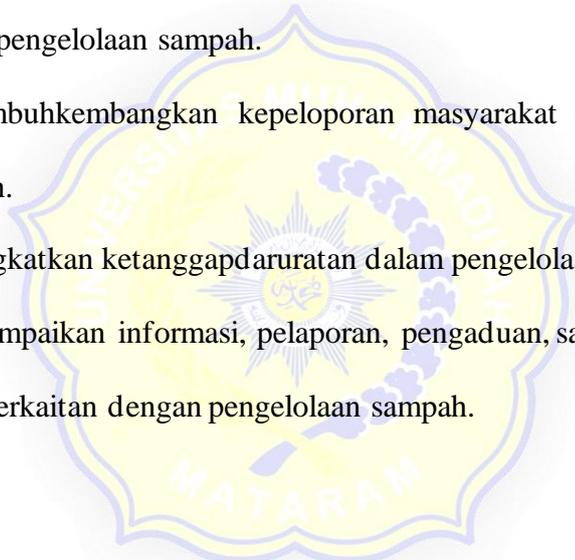
- a. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya.
- b. Membuang sampah sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah.

- d. Menyiapkan wadah sampah yang sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan.
- e. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau mudah diurai oleh proses alam.

#### **2.3.4.4 Peran Serta Masyarakat**

Dalam pengelolaan sampah, setiap masyarakat dapat berperan serta dengan cara:

- a. Meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan, dan kemitraan dalam pengelolaan sampah.
- b. Menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- c. Meningkatkan ketanggapdaruratan dalam pengelolaan sampah.
- d. Menyampaikan informasi, pelaporan, pengaduan, saran, dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.



## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

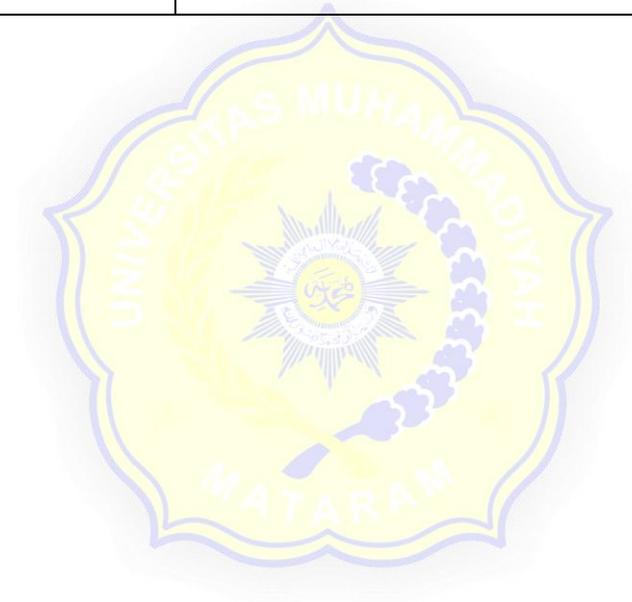
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Jumarni (2021)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?</li> <li>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yaitu berupa tenaga, dan keterampilan. Bentuk partisipasi tenaga yaitu masyarakat dilibatkan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan di sekitar lingkungan masyarakat. dan semua masyarakat yang turung kelapangan untuk membersihkan got-got dan area lingkungan Kantor Kelurahan Palattae. Sedangkan bentuk partisipasi keterampilan dalam pengelolaan sampah yaitu di libatkan dalam bentuk usaha yang di lakukan oleh kelompok ibuibu rumah tangga dibagian lingkungan selatan, yaitu dengan cara mengelola sampah dari kerajinan tangan seperti pembuatan vas bunga dari gardus bekas, dan bunga dari botol bekas dan lain-lainya.</li> <li>2. Tingkat partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. partisipasi dalam pelaksanaan yaitu masyarakat yang sering turung kelapangan dalam melaksanakan</li> </ol>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>kegiatan kerja bakti setiap hari jum'at. dan hanya beberapa masyarakat saja yang sering melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan tingkat pemanfaatan hasil yaitu beberapa kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan hasil dari barang bekas seperti dalam pembuatan kerajinan tangan. Seperti pembuatan tempat tissue, pembuatan vas bunga dan lain-lainya.</p>
2.	Glently Teesen (2017)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan	1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat?	Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kawangkoan Bawah dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi: a) partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau pikiran, dalam penyaluran aspirasi yang dilakukan kebanyakan pemerintah kelurahan melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan di luar forum formal dengan aparat pemerintah kelurahan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat; b) partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, masyarakat ikut terlibat berpartisipasi melalui tenaga ini dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang dalam menyumbangkan tenaganya. Bentuk partisipasi dalam bentuk tenaga ini adalah

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>merupakan bentuk partisipasi yang paling banyak diberikan oleh masyarakat Kelurahan Kawangkoan Bawah; dan c) partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dipengaruhi pada tingkat pendapatan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masyarakat kelurahan kawangkoan bawah merasa berat atau terbebani jika berpartisipasi dalam bentuk uang atau dana. Ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang tergolong di bawah rata-rata.</p>
3.	Asep Nurwanda (2018)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik?</li> <li>2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan fisik?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa dan pemerintahan daerah secara keseluruhan sudah dilaksanakan hal ini terlihat dari partisipasi pikiran melalui Musrenbangdes tokoh masyarakat dan masyarakat. Partisipasi tenaga melalui sumbangsih swadaya tenaga. Partisipasi keterampilan, tenaga ahli memberikan bantuan ke pihak lain. Partisipasi barang memberikan alat kerja dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Partisipasi uang melalui pengajuan tokoh masyarakat.</li> <li>2. Hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik di desa dan pemerintahan daerah terdiri dari: tokoh masyarakat dihadapkan pada skala prioritas dan usulan masyarakat tidak disampaikan di dalam forum, partisipasi</li> </ol>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>tenaga warga belum seluruhnya hadir. Pada partisipasi keahlian, terpolirnya tenaga ahli dalam pembangunan fisik. Partisipasi barang adanya pinjaman alat kerja berkualitas kurang dan alat berat terganggu non-teknis. Partisipasi uang; pengajuan uang ke pusat, menunggu lama.</p>

Sumber: Kajian Peneliti, 2022



## **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah wilayah di sekitar aliran Sungai Jangkok yang mengalir di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yaitu di Kelurahan Sayang-Sayang, Karang Taliwang, dan Cakranegara Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2010). Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

Metode penelitian ini sering digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yakni objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data secara kualitatif tentang partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok tanpa mengubah kondisi terkini dari objek tersebut. Data-data yang dikumpulkan didasari oleh variabel-variabel yang telah

ditentukan sebelumnya, dimana data-data tersebut akan dianalisis secara induktif lalu hasil analisis disajikan secara deskriptif.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Observasi Lapangan**

Observasi lapangan merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang ada, tidak terbatas hanya pada perilaku manusia saja (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini dilakukan observasi lapangan terhadap kondisi terkini wilayah penelitian yang meliputi aktifitas masyarakat di wilayah sekitar aliran Sungai Jangkok di Kecamatan Cakranegara. Teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi pasif dan terbuka, yaitu peneliti hanya mengamati aktifitas masyarakat di wilayah sekitar Sungai Jangkok tanpa terlibat dalam aktivitas masyarakat serta masyarakat sadar terhadap keberadaan peneliti yang sedang melakukan observasi.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan namun pertanyaan baru dapat muncul berdasarkan jawaban yang diberikan responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data terkait bentuk partisipasi masyarakat secara

pikiran, ide, atau gagasan, secara tenaga, secara barang, secara keahlian, dan secara uang serta data terkait hambatan-hambatan yang dialami masyarakat seperti ketergantungan dengan pemerintah, minimnya wawasan, keterbatasan waktu, dan minimnya sosialisasi pemerintah atau swasta. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat pada lampiran I.

### 3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Berikut adalah variabel yang ditentukan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Rumusan Masalah	Variabel	Sub-Variabel
Bagaimana bentuk partisipasi serta hambatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran pada Sungai Jangkok secara teknis di Kecamatan Cakranegara?	Bentuk partisipasi masyarakat (Ibori, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi secara pikiran, ide, atau gagasan.</li> <li>2. Partisipasi secara tenaga.</li> <li>3. Partisipasi secara pikiran dan juga tenaga.</li> <li>4. Partisipasi secara keahlian.</li> <li>5. Partisipasi secara barang.</li> <li>6. Partisipasi secara uang.</li> </ol>
	Hambatan dalam berpartisipasi (Deviyanti, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketergantungan dengan pemerintah.</li> <li>2. Minimnya wawasan.</li> <li>3. Ketersediaan waktu.</li> <li>4. Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau swasta.</li> </ol>
	Pengendalian pencemaran sungai secara teknis (Syofyan, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restorasi Hidrologi</li> <li>2. Restorasi Ekologi</li> <li>3. Restorasi Morfologi (KLHK, 2017)</li> </ol>

Sumber: Kajian Peneliti, 2022

### 3.5 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan bagian penting dan berhubungan erat dengan masalah yang diteliti dalam sebuah penelitian. Populasi merupakan sekumpulan individu dengan kualitas dan karakter yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Ciri, karakteristik, dan kualitas tersebut dinamakan sebagai variabel (Nazir, 2003). Dalam penelitian ini, populasi yang ditentukan adalah masyarakat dalam lingkup wilayah di sekitar aliran Sungai Jangkok di Kecamatan Cakranegara. Wilayah-wilayah tersebut yaitu Lingkungan Rungkang Jangkok, Sayang Daye, Sayang Lauk, dan Lendang Kelor di Kelurahan Sayang-Sayang, Lingkungan Karang Taliwang di Kelurahan Karang Taliwang, serta Lingkungan Karang Mas-Mas di Kelurahan Cakranegara Utara. Pada lingkungan-lingkungan tersebut, terdapat bangunan-bangunan yang sebagian besarnya difungsikan sebagai permukiman. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan kawasan di sekitar sungai, maka akan menimbulkan permasalahan baik fisik maupun non-fisik pada sungai (Sari & Khadiyanto, 2014). Peta delineasi kawasan ini dapat dilihat pada peta 3.1.

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel dilakukan apabila terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian karena terdapat jumlah populasi yang besar. Pengambilan sampel haruslah dengan kriteria representatif sehingga dapat mewakili dari seluruh populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dimana teknik *sampling* ini dilakukan karena peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan tujuan tertentu dalam

pengambilan sampel. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Jangkok di Kelurahan Sayang-Sayang, Karang Tawilang, dan Cakranegara Utara. Masyarakat yang menjadi sampel responden adalah masyarakat yang memiliki hubungan dengan Sungai Jangkok, seperti yang bertempat tinggal di sekitar sungai dan rumah-rumah yang memiliki saluran pembuangan langsung ke drainase yang mengalir ke Sungai Jangkok. Data responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Karakteristik Responden Dirinci Berdasarkan Pendidikan

No.	Lingkungan	Pendidikan	Jumlah	Total
1.	Rungkang Jangkok	SD	5	15
		SMP	6	
		SMA	3	
		Diploma/Sarjana	1	
2.	Sayang Daye	SD	7	15
		SMP	5	
		SMA	2	
		Dipola/Sarjana	1	
3.	Sayang Lauk	SD	6	15
		SMP	5	
		SMA	3	
		Diploma/Sarjana	1	
4.	Lendang Kelor	SD	6	15
		SMP	6	
		SMA	3	
		Diploma/Sarjana	0	
5.	Lendang Re	SD	7	15
		SMP	5	
		SMA	2	
		Diploma/Sarjana	1	
6.	Karang Taliwang	SD	6	15
		SMP	5	
		SMA	3	
		Diploma/Sarjana	1	
7.	Karang Mas-Mas	SD	7	15
		SMP	5	
		SMA	3	
		Diploma/Sarjana	0	

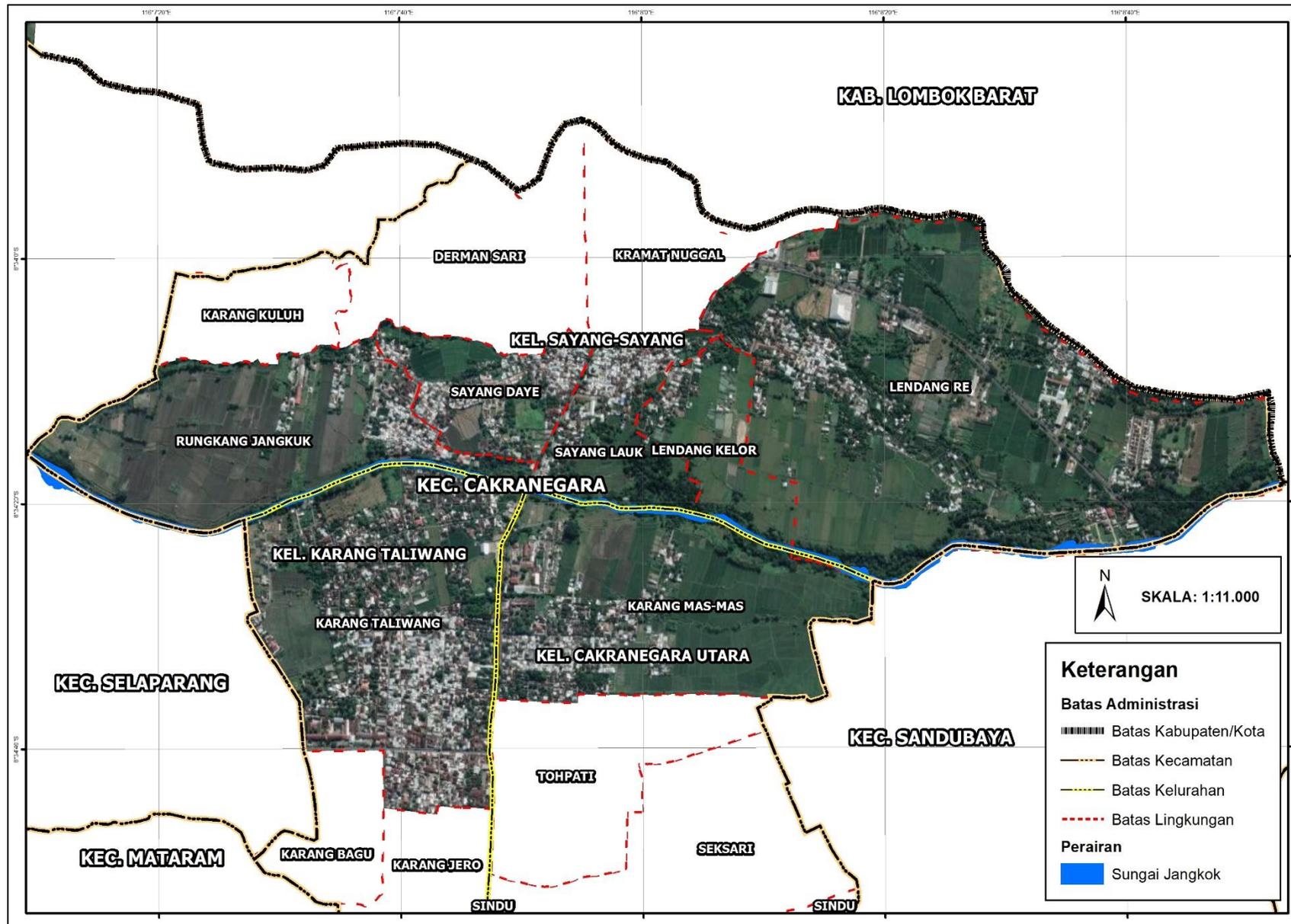
No.	Lingkungan	Pendidikan	Jumlah	Total
<b>Jumah</b>				<b>105</b>

Sumber: Hasil Wawancara, 2022

Tabel 3.3 Karakteristik Responden Dirinci Berdasarkan Pekerjaan

No.	Lingkungan	Pekerjaan	Jumlah	Total
1.	Rungkang Jangkuk	Karyawan	3	15
		Buruh bangunan	3	
		Petani	5	
		Pedagang	3	
		Pelajar	1	
2.	Sayang Daye	Karyawan	4	15
		Buruh bangunan	6	
		Petani	0	
		Pedagang	3	
		Pelajar	2	
3.	Sayang Lauk	Karyawan	2	15
		Buruh bangunan	5	
		Petani	2	
		Pedagang	4	
		Pelajar	2	
4.	Lendang Kelor	Karyawan	3	15
		Buruh bangunan	7	
		Petani	1	
		Pedagang	2	
		Pelajar	2	
5.	Lendang Re	Karyawan	1	15
		Buruh bangunan	5	
		Petani	3	
		Pedagang	5	
		Pelajar	1	
6.	Karang Taliwang	Karyawan	5	15
		Buruh bangunan	5	
		Petani	2	
		Pedagang	1	
		Pelajar	2	
7.	Karang Mas-Mas	Karyawan	3	15
		Buruh bangunan	8	
		Petani	2	
		Pedagang	1	
		Pelajar	1	
<b>105</b>				

Sumber: Hasil Wawancara, 2022



**Peta 3.1 Delineasi Pengambilan Populasi**  
*Sumber: Hasil Olah Data ArcGIS, 2022*

### 3.6 Teknik Analisis Data

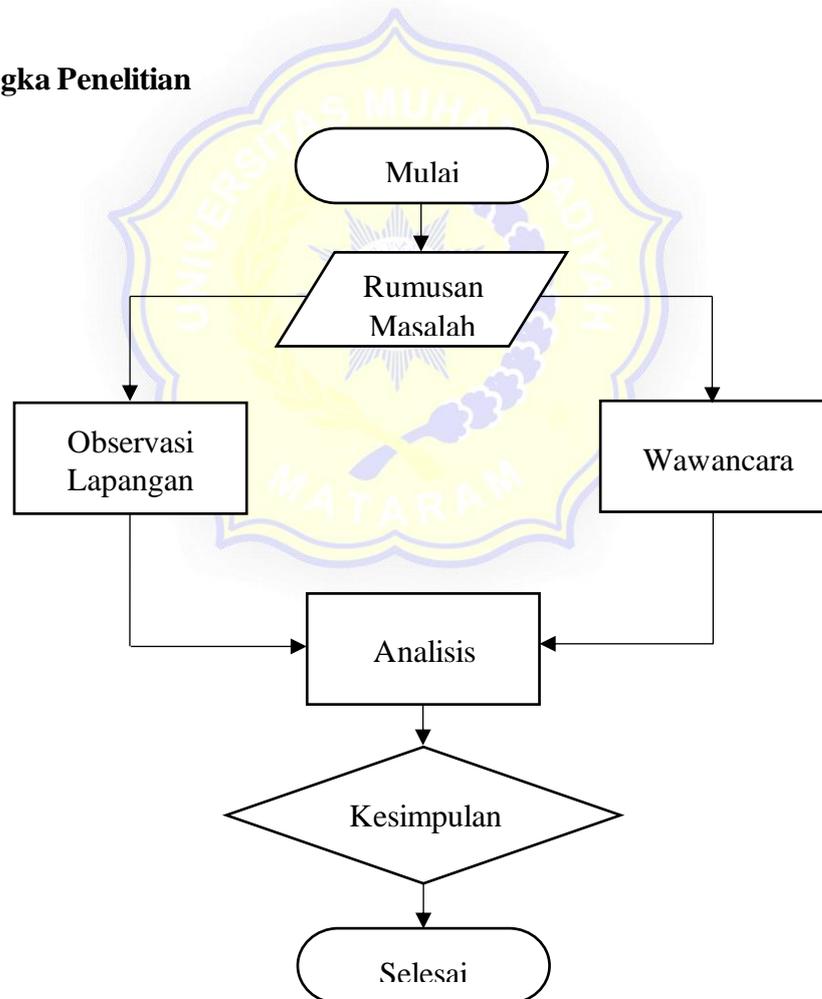
Analisis data adalah instrumen yang digunakan dalam pengelolaan data oleh peneliti menjadi hasil penelitian. Data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dijadikan materi untuk penyimpulan persoalan dari rumusan masalah dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yang merupakan sebuah tahapan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik analisis ini memiliki beberapa komponen pokok, antara lain (Sugiyono, 2010):

1. Reduksi data, yang merupakan tahapan memfokuskan dan merangkum hal-hal yang berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat dan hambatan-hambatan masyarakat dalam berpartisipasi pada pengendalian pencemaran Sungai Jangkok. Jawaban yang didapat dari hasil wawancara kepada masyarakat, dikelompokkan berdasarkan masing-masing sub variabel yang telah ditentukan. Proses reduksi data ini menggunakan bantuan program Microsoft Excel untuk mempermudah pengelompokan jawaban dan mengefisiensikan waktu pengerjaan.
2. Penyajian data, merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan serta menyusun informasi yang didapat dalam penelitian. Jawaban wawancara yang sudah direduksi dan dikelompokkan kemudian disajikan. Penyajian data hasil

pengelompokan ini dilakukan dalam bentuk diagram venn, deskripsi, dan kombinasi keduanya.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan tahapan dimana peneliti menarik kesimpulan dari hasil data yang telah disajikan. Kesimpulan didapat berdasarkan jawaban responden yang telah disajikan menurut sub variabel yang telah ditentukan. Apabila ditemukan jawaban yang kontradiktif antar responden maka dilakukan validasi jawaban kepada aparat pemerintah lingkungan maupun kelurahan, lalu dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

### 3.7 Kerangka Penelitian



Bagan 3.1 Kerangka Penelitian  
Sumber: *Kajian Peneliti*, 2022

### 3.8 Desain Survey

Tabel 3.4 Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub-Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis	Output
<p>Untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dan hambatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok secara teknis.</p>	<p>Bentuk Partisipasi Masyarakat (Ibori, 2013)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi secara pikiran, ide, atau gagasan.</li> <li>2. Partisipasi secara tenaga.</li> <li>3. Partisipasi secara pikiran dan juga tenaga.</li> <li>4. Partisiapsi secara keahlian.</li> <li>5. Partisipasi secara barang.</li> <li>6. Partisipasi secara uang.</li> </ol>	<p>Bentuk partisipasi masyarakat</p>	<p>Aparat pemerintah dan masyarakat</p>	<p>Wawancara</p>	<p>Analisis interaktif berdasarkan data dari hasil wawancara, serta tinjauan kebijakan dan teori yang digunakan.</p>	<p>Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok berdasarkan hasil wawancara, serta teori yang digunakan.</p>

Tujuan	Variabel	Sub-Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis	Output
	Hambatan Dalam Berpartisipasi (Deviyanti, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketergantungan dengan pemerintah</li> <li>2. Minimnya wawasan.</li> <li>3. Ketersediaan waktu.</li> <li>4. Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau swasta</li> </ol>	Hambatan yang dihadapi masyarakat				Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pengendalian pencemaran Sungai Jangkok berdasarkan hasil wawancara, serta teori yang digunakan.
	Pengendalian Pencemaran Sungai Secara Teknis (Syofyan, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restorasi Hidrologi.</li> <li>2. Restorasi Ekologi</li> <li>3. Restorasi Morfologi. (KLHK, 2017)</li> </ol>	Bentuk Pengendalian Pencemaran Sungai Jangkok secara teknis	Hasil analisis bentuk partisipasi masyarakat pada pengendalian pencemaran Sungai Jangkok	Reduksi data hasil analisis bentuk partisipasi masyarakat	Analisis Interaktif berdasarkan hasil analisis bentuk partisipasi masyarakat pada pengendalian pencemaran Sungai Jangkok	Untuk mengidentifikasi bentuk pengendalian pencemaran Sungai Jangkok secara teknis berdasarkan hasil analisis bentuk partisipasi masyarakat.

Sumber: Kajian Peneliti, 2022